



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BERLIN DAMANIK**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **163785**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.825.000.000**

1. Bangunan Seluas 12 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di SIMALUNGUN, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Bangunan Seluas 34 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1360 m2/150 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/50 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/250 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 845.000.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000



5. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000
6. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.067.867

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.901.067.867

III. HUTANG Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.821.067.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.